



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO **TAHUN 2024**





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sukoharjo, 19 Februari 2025

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

ABDUL HARIS WIDODO, S.IP., M.Si., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 198903 1 011

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Pelaporan kinerja merupakan bagian dari sistem pertanggungjawaban berbentuk laporan kinerja yaitu ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sukoharjo, Januari 2025

 SEKRETARIS DAERAH




WIDODO, S.H, M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19650523 199203 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan berdasarkan tingkat pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024. Pada Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik. Adapun dari kedua sasaran tersebut disertai dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, yaitu Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan; Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum; dan Nilai SAKIP perangkat daerah yang dilaksanakan oleh 9 (sembilan) bagian yang ada di Sekretariat Daerah.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 telah mencapai 107,77 % (Tinggi). Pelaksanaan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo didukung 3 program dengan jumlah anggaran Rp 74.247.411.863,00 serta realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran strategis sebesar Rp 70.892.496745,00 (95,5). Efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 4,5% (empat koma lima persen).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
B. Tupoksi Organisasi.....	3
C. Aspek Strategis Organisasi	4
D. Isu Strategis	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Metode Pengukuran Kinerja	13
B. Capaian Kinerja Organisasi	14
C. Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi.....	38
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya	38
E. Capaian Indikator Kinerja.....	51
F. Penghargaan.....	55
BAB IV PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	63
B. Progress Penyelesaian Isu Strategis.....	63
C. Saran.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel I.C.1	Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 berdasarkan Golongan	3
Tabel II.A.1	Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator.....	7
Tabel II.A.2	Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	8
Tabel II.B.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
Tabel III.A.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	14
Tabel III.B.1.1	Capaian Kinerja pada Tahun 2024 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	14
Tabel III.B.1.2	Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024.....	15
Tabel III.B.1.3	Capaian Program Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2024	21
Tabel III.B.1.4	Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024	27
Tabel III.B.1.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	32
Tabel III.B.1.6	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	33
Tabel III.B.2.1	Capaian Kinerja pada Tahun 2024 Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	34
Tabel III.B.2.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	35
Tabel III.B.2.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	35
Tabel III.B.2.4	Perbandingan nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah lain	36
Tabel III.C.1	Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi	38

Tabel III.D.1	Jumlah Bezzeting dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.....	38
Tabel III.D.2	Tingkat Efisiensi	43
Tabel III.E.1	Capaian Indikator Kinerja	51

DAFTAR GRAFIK

Gambar III.B.1	Perbandingan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan nilai SAKIP Sekretariat Daaerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonogiri Tahun 2024	37
Gambar III.F.1	Penghargaan Pengelolaan JDIH Nasional Tahun 2024.....	56
Gambar III.F.2	Pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Tengah	57
Gambar III.F.3	Penghargaan Indeks Reformasi Hukum	57
Gambar III.F.4	Penghargaan Subroto dari Kementrian ESDM	58
Gambar III.F.5	Penghargaan EBTKE dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	59
Gambar III.F.6	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI	60
Gambar III.F.7	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	61
Gambar III.F.8	Capaian Tingkat Kematangan UKPBJ	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah Dan Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku koordinator atas:
 - 1) Bagian Pemerintahan terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3) Bagian Hukum terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Perundang-undangan;
 - b) Sub Koordinator Bantuan Hukum; dan
 - c) Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selaku koordinator atas:
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

- b) Sub Koordinator Perekonomian; dan
 - c) Sub Koordinator Sumber Daya Alam.
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
- a) Sub Koordinator Penyusunan Program;
 - b) Sub Koordinator Pengendalian Program; dan
 - c) Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
- a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum selaku koordinator atas:
- 1) Bagian Umum terdiri dari:
- a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- 2) Bagian Organisasi terdiri dari:
- a) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:
- a) Sub Koordinator Protokol;
 - b) Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan.

Salah satu instrumen pokok dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah aparatur sipil negara dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

Tabel I.C.1
Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024
berdasarkan Golongan

No	NAMA BAGIAN	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	- (PPPK)	Jumlah
1	Umum					2	5	3	7	4	3	2	1	5	32
2	Perekonomian dan SDA			1	1	4		1						3	10
3	Administrasi Pembangunan				2	2	1							3	8
4	Prokopim			1		1		5	2		1	1		4	15
5	Kesejahteraan Rakyat				2	1	3	2		1	1			1	11
6	Hukum			1		3		2	2					2	10
7	Pemerintahan			1	1	2		1	2	1				1	9
8	PBJ				1	2	6	5						3	17
9	Organisasi			1		3		5	1					3	13
10	Setda	1	4	2											7
Jumlah		1	4	7	7	20	15	24	14	6	5	3	1	25	132

Sumber: Bagian Umum Setda

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki jumlah ASN sebanyak 132 orang yang terdiri dari Bagian Umum 32 orang, Bagian Perekonomian dan SDA 10 orang, Bagian Administrasi Pembangunan 8 orang, Bagian Prokompim 15 orang, Bagian Kesejahteraan Rakyat 11 orang, Bagian Hukum 10 orang, Bagian Pemerintahan 9 orang, Bagian PBJ 17 orang, Bagian Organisasi 13 orang, dan Setda 7 orang.

B. Tupoksi Organisasi

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan staf ahli serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. perumusan penyusunan kebijakan daerah;
2. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
3. penyelenggaraan kebijakan daerah;
4. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
5. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
7. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara; dan

8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, Visi Bupati Sukoharjo adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
3. Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi;
4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah misi kesatu, yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi”**.

D. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi (OPD) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah:

- a. Belum optimalnya penyusunan laporan kinerja;
- b. Belum optimalnya pelaporan pelaksanaan APBD;
- c. Belum optimalnya implementasi katalog versi 6;

- d. Penegasan batas daerah;
- e. Belum optimalnya proses penyusunan produk hukum dan publikasi hukum;
- f. Belum optimalnya pelayanan Kedinasan KDH / WKDH;
- g. Sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia Perangkat Daerah kurang memadai;
- h. Belum Optimalnya Kinerja BUMD;
- i. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | <p>Pendahuluan</p> <p>Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi dan sistematika penulisan.</p> |
| Bab II | <p>Perencanaan Kinerja</p> <p>Pada bab ini disajikan perencanaan strategis, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.</p> |
| Bab III | <p>Akuntabilitas Kinerja</p> <p>Pada bab ini diisajikan penjelasan metode pengukuran kinerja, capaian kinerja organisasi, analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran, serta akuntabilitas anggaran.</p> |
| Bab IV | <p>Penutup</p> <p>Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum capaian kinerja, progress penyelesaian isu strategis dan saran.</p> |

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis merupakan hal yang sangat diperlukan oleh sebuah organisasi dalam menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai. Rencana strategis juga akan memperjelas konsep organisasi dalam menentukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral dan komprehensif. Demikian halnya dengan organisasi Pemerintah Daerah, maka keberadaan rencana strategis mutlak diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Dalam konteks Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, rencana strategis dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Rencana strategis dimaksud mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2024 beserta program pendukungnya diuraikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Tujuan, Sasaran Strategis dan indikator sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 tergambar dalam matrik sebagai berikut:

Tabel II.A.1
Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel		<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kepatuhan standar pelayanan publik 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 2. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan. 3. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum.
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	Nilai SAKIP

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Dengan mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator pada beberapa sasaran diawali dengan penentuan alternatif strategi pencapaian indikator sasaran, sebagaimana pada uraian berikut:

Tabel II.A.2
Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Visi	MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR			
Misi 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perumusan dan pengendalian kebijakan	Peningkatan kualitas koordinasi perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintah daerah
			Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah 3. Peningkatan koordinasi penegasan batas daerah 4. Peningkatan penyelesaian permasalahan kewilayahan
			Meningkatkan kapasitas SDM aparatur produk hukum daerah	Peningkatan kapasitas SDM aparatur produk hukum daerah
			Meningkatkan kualitas layanan kemasyarakatan	Pemberian layanan secara optimal kepada masyarakat
			Meningkatkan kinerja BUMD	Peningkatan Kualitas Pembinaan kepada BUMD
			Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan SDM pengadaan barang/jasa & sarana prasarana pendukung 2. Peningkatan fasilitasi pengadaan barang dan jasa
			Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penataan kelembagaan,	Komunikasi aktif dan intensif dengan perangkat daerah dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja

Visi	MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR			
Misi 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Percepatan Reformasi Birokrasi			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja	
			Menyempurnakan regulasi di bidang kelembagaan tata laksana dan pengembangan kinerja	Kajian dan evaluasi regulasi di bidang kelembagaan, tatalaksana dan pengembangan kinerja
			Meningkatkan kapasitas SDM Bidang kelembagaan tatalaksanaan dan pengembangan kinerja	Penyelenggaraan bimbingan teknis untuk aparatur perangkat daerah dalam bidang kelembagaan, tatalaksana dan pengembangan kinerja
			Meningkatkan kualitas layanan kedinasan KDH/WKDH	Peningkatan kualitas layanan kedinasan KDH/WKDH
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadahi	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
			Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur	Peningkatan kompetensi SDM Aparatur
			Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas perumusan dan pengendalian kebijakan
- b) Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
- c) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur produk hukum daerah
- d) Meningkatkan kualitas layanan kemasyarakatan
- e) Meningkatkan kinerja BUMD
- f) Memulihkan perekonomian daerah
- g) Meningkatkan kualitas layanan pengadaan barang/jasa pemerintah

3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - 1) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
 - 2) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan;
 - 3) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah; dan
 - 4) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
- b) Program Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
 - 2) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;
 - 3) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; dan
 - 4) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa.
- c) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran terdiri dari
 - 1) Kegiatan Penataan Organisasi;
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Prokopim);
 - 4) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 5) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 6) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 7) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 8) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 10) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 11) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - 12) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024 telah menetapkan Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, adalah sebagaimana terlampir:

Tabel II.B.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	100%
		2. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan.	100%
		3. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	77

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

A. Metode Pengukuran Kinerja

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja, sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka setiap indikator kinerja sasaran akan dinilai dengan pengukuran skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel III.A.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA ORDINAL	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

B. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dan Renstra Tahun 2021-2026, terdapat 2 sasaran, yaitu:

1. Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pencapaian kinerja pada sasaran 1 yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.1.1
Capaian Kinerja pada Tahun 2024
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	101,01	101,01%
2.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	100	113,26	113,26%
3.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100	100%
Rata-rata capaian					104,76%

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran 1, yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, realisasi kinerja lebih tinggi dengan yang ditargetkan, sehingga rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar **104,76%** sehingga dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Adapun realisasi dan capaian masing masing indikator sebagai berikut:

- a. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2024 terealisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat merupakan indikator yang diperoleh dari total realisasi indikator pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dibagi total

target indikator pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dikali 100 persen.

Adapun realisasi dan capaian indikator Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat ditunjang dari tiga indikator pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:

Tabel III.B.1.2
Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	100	100	100%
2	Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	97	100	103,09%
3	Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	100	100	100%

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, untuk **Bagian Kesejahteraan Rakyat** terdiri dari:

a) Kegiatan:

- Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

b) Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial; dan
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 indikator kinerja pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat tercapai sesuai target yang ditetapkan dan capaian rata-rata 100%. Capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 yaitu sebesar 95%.

Faktor pendukung dari capaian kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, antara lain:

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Target Indikator yaitu 12 Dokumen dengan pencapaian 12 Dokumen atau tercapai 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain:

- Terselenggaranya Kegiatan Pengajian Rutin Baitul Hikmah di Rumah Dinas Bupati Sukoharjo setiap bulan
 - Terselenggaranya Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan tingkat Kabupaten Sukoharjo
 - Terselenggaranya Kegiatan Amaliyah Ramadhan yang meliputi kegiatan Tarawih Keliling di 12 Kecamatan dan pembagian Paket Sembako kepada Masyarakat kurang mampu dan Tenaga Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo serta Kegiatan Halal bihalal di 12 Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo
 - Terselenggaranya Pembinaan Keagamaan bagi ASN dan Karyawan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
 - Terfasilitasinya Jamaah Haji Kabupaten Sukoharjo
 - Terlaksananya pemberian hewan qurban bagi Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan di Kabupaten Sukoharjo
 - Terlaksananya pemberian bantuan kegiatan keagamaan bagi Lembaga atau Kelompok Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Target Indikator yaitu 3 Dokumen dengan pencapaian 3 Dokumen atau tercapai 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain:

- Terfasilitasinya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo
- Terlaksananya pemberian bantuan kegiatan sosial bagi Lembaga atau Kelompok Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo
- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi terkait Kesejahteraan Sosial

c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Target Indikator yaitu 5 Dokumen dengan pencapaian 5 Dokumen atau tercapai 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain:

- Terselenggaranya Kegiatan Senam bersama ASN dan Karyawan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
- Terselenggaranya Kegiatan Gowes Forkopimda bersama Masyarakat di 12 Kecamatan
- Terlaksananya pemberian bantuan alat olahraga berupa bola dan net voli, bola dan Jaring gawang bagi kelompok masyarakat di Kabupaten Sukoharjo
- Terlaksananya pemberian bantuan kegiatan Kesenian dan Olahraga bagi Lembaga atau Kelompok Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo
- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi terkait Kesejahteraan Masyarakat

2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, untuk **Bagian Hukum** terdiri dari:

a) Kegiatan:

- Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

b) Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Fasilitasi Bantuan Hukum;
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

Adapun Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum terealisasi 100% dari target 97% dengan capaian 103,09 %. Adapun capaian kinerja pada kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum adalah sebagai berikut Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum terealisasi 2 kasus dari target 2 kasus. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan target 3 Dokumen dengan Capaian 3 Dokumen,

sedangkan untuk Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan target 2 Dokumen dengan capaian realisasi 2 Dokumen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Hukum tahun 2024 antara lain:

a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang berupa:

- Memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah sejumlah 14 Peraturan Daerah
- Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati sejumlah 65 Peraturan Bupati; dan
- Memfasilitasi Penyusunan Keputusan Bupati sejumlah 938 Keputusan
- Selain melakukan fasilitas penyusunan produk daerah juga melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum daerah.

b) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Memfasilitasi Bantuan Hukum sebanyak yaitu:

- Perkara Perdata Nomor: 809/Pdt.G/2024/PA.Skh antara Suginah (Penggugat) dan Camat Bendosari (Turut Tergugat II);
- Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 44K/TUN/2024 tanggal 4 Maret 2024 jo. Nomor: 126/B/2023/PT.TUN.SBY tanggal 6 September 2023 jo. Nomor: 10/G/2023/PTUN.Smg tanggal 14 Juni 2023 antara Sudino (Penggugat) dan Bupati Sukoharjo (Tergugat) dengan agenda Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Pihak Penggugat.

Selain memfasilitasi bantuan hukum juga melaksanakan kegiatan berupa:

- Terselenggaranya Rapat Koordinasi Stakeholder Hak Asasi Manusia;
- Terlaksananya Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru;

- Terlaksananya Fasilitasi Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi manusia (P5 HAM) meliputi pelaporan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM);
 - Terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin berupa kegiatan non litigasi.
- c) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
- Melakukan pengelolaan Informasi hukum yang didokumentasikan sebanyak: Peraturan Daerah 14 Dokumen; Peraturan Bupati 65 Dokumen; dan Keputusan Bupati 938 Dokumen.
 - Melakukan Sosialisasi Hukum kepada Aparatur Pemerintah dan Masyarakat yang meliputi: Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM); dan Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan Hukum Peraturan Daerah.
 - Melakukan pengelolaan terhadap perpustakaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
 - Melakukan koordinasi bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
 - Melakukan Publikasi Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Surat Keputusan Bupati).

3) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, untuk **Bagian Pemerintahan** terdiri dari:

a) Kegiatan:

- Administrasi Tata Pemerintahan;
- Fasilitasi Kerjasama Daerah.

b) Sub Kegiatan:

- Penataan Administrasi Pemerintahan;
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah; dan
- Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri.

Adapun Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Adapun capaian kinerja tersebut diperoleh dari jumlah total realisasi indikator kegiatan administrasi tata pemerintahan dan kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dibagi jumlah total target kegiatan administrasi tata pemerintahan dan kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dikali 100 persen. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan terealisasi 5 kebijakan dari target 5 kebijakan. Keberhasilan pencapaian kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan didukung oleh:

- a) Adanya kerjasama yang baik dengan Kabupaten sekitar
- b) Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan penyusunan data-data LKPJ, LPPD, RLPPD dan SPM yang waktunya sudah dimulai sejak akhir tahun berjalan khususnya dalam bimbingan teknis penyusunan, rapat koordinasi dan pengumpulan matrik data dari masing-masing Perangkat Daerah

Sedangkan Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah terealisasi 10 dokumen dari target 10 dokumen. Keberhasilan pencapaian kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah didukung oleh adanya kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

- b. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan pada tahun 2024 terealisasi 113,26% dari target 100% sehingga capaiannya mencapai 113,26%.

Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan merupakan indikator yang diperoleh dari total realisasi indikator pada program Perekonomian dan pembangunan dibagi total target indikator pada program perekonomian dan pembangunan dikali 100 persen. Adapun realisasi dan capaian indikator Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang melampaui target ditunjang dari tiga indikator pada program Perekonomian dan Pembangunan sebagai berikut:

Tabel III.B.1.3
Capaian Program Perekonomian Dan Pembangunan Tahun 2024

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan	100	100	100%
2	Cakupan pengadaan barang dan jasa	45	77,49	172,20%
3	Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	100	100	100%

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Program Perekonomian dan Pembangunan, untuk **Bagian Administrasi Pembangunan** terdiri dari:

a) Kegiatan:

- Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.

b) Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan;
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

Adapun Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 indikator kinerja pada masing-masing 3 sub kegiatan pada Bagian Administrasi Pembangunan tercapai sesuai target yang ditetapkan dan capaian rata-rata 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2024 antara lain:

- a) Pelaksanaan forum OPD yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024;
- b) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2025;
- c) Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan yang dilaksanakan 4 (empat) kali, antara lain:
 - Rakor POK Triwulan I
Dilaksanakan tanggal 30 April 2024. Di Triwulan I Realisasi keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sukoharjo Rp 345.110.812.491 atau 14,85%.

- Rakor POK Triwulan II
Dilaksanakan tanggal 18 Juli 2024. Di Triwulan II Realisasi keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sukoharjo Rp 868.221.651.945 atau 37,04%.
 - Rakor POK Triwulan III
Dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2024. Di Triwulan III Realisasi keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sukoharjo Rp 1.607.728.139.235 atau 65,83%.
 - Rakor POK Triwulan IV
Dilaksanakan tanggal 12 Desember 2024. Di Triwulan IV Realisasi keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sukoharjo Rp 1.976.970.865.070 atau 80,95%.
- d) Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proyek Strategis TA 2024 10 (sepuluh) proyek strategis tahun 2024 dapat selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan DAK Fisik kepada OPD penerima DAK Fisik TA 2024 yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Perikanan, DPPKBP3A.
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada OPD penerima yaitu: DPMD, DPUPR, BAPPERIDA, DKK, RSUD, BPKPAD.
- g) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa khusus untuk kegiatan fisik. Pada Tahun 2024 ada 139 (seratus tiga puluh sembilan) desa dengan 810 (delapan ratus sepuluh) titik penerima bantuan keuangan untuk fisik/konstruksi APBD Penetapan TA 2024. Desa-desanya tersebut sudah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pada tanggal 18 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024.
- 2) Program Perekonomian Dan Pembangunan, untuk **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** terdiri dari
- a) Kegiatan:
- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.

b) sub Kegiatan:

- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Cakupan Pengadaan Barang dan Jasa dengan target 45 nilai mencapai realiasi 77,49 nilai. Nilai tersebut merupakan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan 2024, untuk Kabupaten Sukoharjo mendapat nilai 77,49. Nilai dimaksud terdiri dari:

a) Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan skor 22,49, nilai tersebut terdiri dari : SiRUP dengan skor 10, *e-purchasing* dengan skor 3,29, *non e-tendering/non e-purchasing* dengan skor 0, *e-tendering* dengan skor 4,74, toko daring dengan nilai 0 dan e-kontrak 4,47. Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan dari skor maksimal 30 mendapat nilai 22,49, sudah mencapai nilai yang baik hal ini dikarenakan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara UKPBJ dengan para pelaku pengadaan di Perangkat Daerah sehingga penyelesaian paket pengadaan barang/jasa pada aplikasi SPSE sampai dengan paket selesai dan sudah dilakukan penilaian kinerja penyedia. Namun pada indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan masih terdapat 2 (dua) sub indikator masih mendapat skor 0, sebagai berikut:

- sub indikator *non e-tendering/non e-purchasing* dengan skor 0 dari skor maksimal 5, hal ini dikarenakan nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung (transaksional dan pencatatan) belum mencapai 50%; dan
- toko daring dengan skor 0 dari skor maksimal 1, hal ini dikarenakan tidak terdapat transaksi pada toko daring.

Terhadap Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan kedepannya akan ditingkatkan kembali agar mendapat nilai yang maksimal khususnya untuk sub indikator yang masih mendapat nilai 0.

b) Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dengan skor 15. Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dari skor maksimal

30 baru mendapat skor 15. Pada Tahun 2024 dilakukan penghitungan dan pengusulan perubahan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) ke LKPP yang semula jumlah kebutuhan JFPPBJ sebanyak 35 orang menjadi 26 orang sesuai Surat Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI Nomor : 19499/D.3/07/2024 Tanggal 20 Juli 2024 perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan rincian : JF PPBJ Ahli Madya 3 orang, JFPPBJ Ahli Muda 10 orang, dan JF PPBJ Ahli Pertama 13 orang. Tahun 2024 mendapatkan tambahan JF PPBJ Ahli Pertama dari Formasi PPPK sebanyak 5 orang, 3 orang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda namun yang 2 orang berkedudukan di RSUD Ir. Soekarno. Untuk pemenuhan kebutuhan JF PPBJ telah dilakukan perpindahan dari jabatan lain untuk JF PPBJ Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang dan sudah mengikuti uji kompetensi serta mendapatkan rekomendasi untuk diangkat menjadi JF PPBJ. Selain itu, telah mengusulkan 1 orang JF PPBJ Ahli Pertama dari formasi CPNS. Pada Tahun 2024 jumlah JF PPBJ sebanyak 13 orang (4 orang JF PPBJ Ahli Muda dan 9 orang JF PPBJ Ahli Pertama) dari 26 orang dari rekomendasi kebutuhan LKPP, mencapai 50% sehingga mendapat skor 15.

- c) Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dengan skor 40.00. Dari target nilai 45 terealisasi nilai 77,49 hal ini dikarenakan untuk Kematangan UKPBJ Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024 telah mencapai level Proaktif 9/9 dan mendapat penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan capaian tingkat kematangan UKPBJ Level Proaktif 9/9 sehingga dapat mencapai skor maksimal 40.

Pada Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- a) Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah di Kabupaten Sukoharjo, yaitu : tender/seleksi sebanyak 105 paket, pengadaan langsung sebanyak 732 paket dan e-purchasing sebanyak 2313 paket.
- b) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan setiap Triwulan.
- c) Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali kegiatan, yaitu : bimbingan teknis perencanaan pengadaan barang/jasa dengan peserta admin SiRUP, sosialisasi pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing* dengan peserta PPK, Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*e-purchasing*) pada Katalog Elektronik untuk Penyedia dengan peserta penyedia barang/jasa dibidang konstruksi, Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pendampingan Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik, dan Sosialisasi Penyelesaian Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan peserta PPK.
- d) Melaksanakan Kegiatan Layanan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 melalui rapat koordinasi setiap bulan yang dilaksanakan selama 11 (sebelas) bulan dari bulan Februari s/d Desember 2024 dengan membahas perkembangan 10 (sepuluh) proyek strategis. Tim terdiri dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Kepolisian Resor Sukoharjo, Inspektorat, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo.
- e) Memfasilitasi pengguna layanan pengadaan secara elektronik antara lain : pendaftaran penyedia, verifikasi akun penyedia, pendaftaran penyedia katalog, penayangan produk katalog dan konsultasi/pendampingan bagi penyedia dan perangkat daerah.

- f) Melaksanakan kegiatan desk penginputan SiRUP dan desk pencatatan *non e-tendering/non-epurchasing*.
- g) Melaksanakan kegiatan sosialisasi pembuatan akun Katalog Versi 6 bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Bendahara.
- h) Pembuatan Etalase Pekerjaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukoharjo pada Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Sukoharjo.

3) Program Perekonomian Dan Pembangunan, untuk **Bagian Perekonomian dan SDA** terdiri dari:

a) Kegiatan:

- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
- Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

b) Sub Kegiatan:

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
- Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Adapun Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Hal ini disebabkan karena tahun 2024 indikator kinerja pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan SDA tercapai sesuai target yang ditetapkan dan capaian 100%. Kegiatan telah dilaksanakan di Bagian Perekonomian meliputi fasilitasi, koordinasi, monitoring dan dan evaluasi bidang BUMD, BLUD, ekonomi dan Sumber Daya Alam.

- c. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum pada tahun 2024 terealisasi 100% dari target 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum merupakan indikator yang diperoleh dari total realisasi indikator pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dibagi total target indikator pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dikali 100 persen.

Adapun realisasi dan capaian indikator perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum ditunjang dari tiga indikator pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel III.B.1.4
Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi	100	100	100%
2	Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	100	100	100%
3	Cakupan Peningkatan Sarana/ Pra sarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	100	100	100%

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, untuk **Bagian Organisasi** terdiri dari:
 - a) Kegiatan:
 - Penataan Organisasi.
 - b) sub Kegiatan:
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Keberhasilan capaian tersebut

dipengaruhi dari tersusun dan terselesaikannya dokumen yang mencakup:

- a) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- b) Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- c) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Terselesaikannya dokumen dimaksud tidak lepas dari koordinasi dan dukungan dari jajaran perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo dan instansi pemerintah Pembina, serta tersedianya peraturan perundangan sebagai panduan pelaksanaan.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, untuk **Bagian Umum** terdiri dari 9 Kegiatan dan 38 sub Kegiatan, yaitu:

a) Kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

b) Sub Kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Adapun capaian indikator Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Keberhasilan capaian tersebut dipengaruhi dari tersusun dan terselesaikannya dokumen yang mencakup:

- a) Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah 85,29 dengan Predikat A
- b) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sekretariat Daerah Tahun 2024.
- c) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024
- d) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024
- e) Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah

Terselesaikannya dokumen dimaksud tidak lepas dari koordinasi dan dukungan dari seluruh Bagian Sekretariat Daerah dan menguatkan komitmen bersama untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dengan mengadakan rapat rutin evaluasi kinerja per triwulan dengan dipimpin langsung Sekretaris Daerah selaku pimpinan OPD.

Adapun capaian indikator Cakupan Peningkatan Sarana/ Pra sarana Kerja dan Kualitas SDM OPD terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Pada Tahun ini Bagian Umum Juga telah menyelesaikan pengadaan Sepeda motor Dinas bagi Kepala Desa/Lurah dan Kasubag di Setda sebanyak 173 unit sepeda motor. Pengadaan ini dimaksudkan untuk menunjang operasional Kepala Desa/Lurah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, sedangkan pengadaan sepeda motor bagi Kasubag di Sekretariat Daerah dimaksudkan untuk meremajaan kendaraan dinas karena kendaraan dinas yang lama sudah berumur 12 tahun. Disamping mengelola sarana dan Prasarana kantor, Bagian Umum juga bertugas sebagai unit yang bertanggungjawab dalam mengelola kebersihan di lingkungan Menara Wijaya, memelihara taman di lingkungan Sekretariat Daerah agar lingkungan bersih dan asri serta terawat dengan baik, Kegiatan penatausahaan kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, fasilitasi tamu serta fasilitasi kebutuhan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris daerah juga merupakan tanggung jawab dari Bagian Umum.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, untuk **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** terdiri dari:

a) Kegiatan:

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

b) sub Kegiatan:

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- Fasilitasi Keprotokolan;
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
- Pendokumentasian Tugas Pimpinan.

Fasilitasi Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan dengan target pada tahun 2024 adalah 100% dan dapat dicapai dengan realisasi 100%.

Hal ini dikarenakan setiap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah terfasilitasi dengan maksimal, yang mana Bagian Protokol

dan Komunikasi Pimpinan merupakan Bagian yang sudah melekat dengan agenda rutin pimpinan.

Selain Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan juga mengampu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan dan telah terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Adapun bentuk Sosialisasi dalam rangka Gempur Rokok ilegal dengan Sosialisasi Media Tatap Muka dan Media Elektronik. Media tatap muka melalui pelaksanaan lomba sport/event olahraga gempur rokok ilegal (nonton bareng), pelaksanaan event olahraga dalam rangka sosialisasi gempur rokok illegal (turnamen futsal dan badminton), pagelaran kesenian sosialisasi gempur rokok illegal (konser musik), sosialisasi tatap muka Peraturan Perundang – undangan Bidang Cukai di setiap Kecamatan, Pelaksanaan Lomba Sport Gempur Rokok illegal, Talk Show, Advetorial dan Special Event. Adapun untuk media elektronik meliputi Neon Box untuk wilayah Industri Rokok, Baliho Gempur Rokok Ilegal, Penyampaian Informasi Gempur rokok illegal melalui Running Text dan Videotron.

Adapun perbandingan realisasi dan prosentase capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel III.B.1.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2023		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100%	99,66	99,66%	100	100%
2.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	100	113,26	113,26%	113,27	113,27%	111,31	111,31%
3.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100	100%	100	100%	108	108%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa:

- a. Realisasi indikator cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2022 sebesar 100 dengan capaian 100%. Pada tahun 2023 terdapat penurunan realisasi menjadi 99,66 dengan capaian 99,66%. Kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi menjadi 100 dengan capaian 100%. Terdapat kenaikan realisasi dan capaian sebesar 0,34%.
- b. Realisasi indikator cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan dalam tiga tahun terakhir selalu mengalami kenaikan realisasi, yaitu sebesar 111,31 dengan capaian 111,31% pada tahun 2022 naik menjadi 113,27 dengan capaian 113,27% pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 terealisasi menjadi 113,26 dengan capaian 113,26%.
- c. Realisasi indikator cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum pada tahun 2022 sebesar 108 dengan capaian 108%. Kemudian pada tahun 2023 terealisasi sebesar 100 dengan capaian 100%. Meskipun terdapat penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2022, namun realisasi pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2024 terealisasi 100 dengan capaian 100% sesuai target yang ditetapkan.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.B.1.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra
Sasaran 1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Capaian thd Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6
1.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	101,01	100	101,01%
2.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	113,26	100	113,26%
3.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100	100
Rata-rata capaian					104,76%

Realisasi kinerja tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka rata-rata capaian sasaran 1 adalah **108,02 %**. Adapun capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

- a. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat memperoleh realisasi sebesar 101,01 dari target akhir Renstra sebesar 100 sehingga capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 101,01%.
- b. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan memperoleh realisasi sebesar 113,26 dari target akhir Renstra sebesar 100 sehingga capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 113,26%.
- c. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan administrasi umum memperoleh realisasi sebesar 100 dari target akhir Renstra sebesar 100 sehingga capaian terhadap target akhir Renstra sebesar 100%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja Sasaran 1 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian level nasional, provinsi, kabupaten maupun Perangkat Daerah lain karena perbedaan indikator.

2. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pencapaian kinerja pada sasaran 2 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tercermin pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.B.2.1
Capaian Kinerja pada Tahun 2024
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai SAKIP	Angka	77	85,29*	110,77%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran 2, yaitu Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealisasi pada tahun 2024 sebesar 85,29. Nilai SAKIP pada laporan ini menggunakan nilai pada tahun 2023 karena Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo belum mengadakan evaluasi SAKIP untuk dokumen tahun 2024. Apabila nilai SAKIP sebesar 85,29 dibandingkan dengan target tahun 2024

maka capaiannya sebesar **110,77%** sehingga capaian kinerja pada sasaran ini dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Adapun perbandingan realisasi dan prosentase capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel III.B.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023
Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2023	
			Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai SAKIP	Angka	77	85,29*	110,77%	63,07*	84,09%

Kinerja sasaran 2 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah belum dilakukan evaluasi untuk dokumen tahun 2024. Realisasi nilai SAKIP pada tahun 2024 menggunakan nilai berdasarkan evaluasi SAKIP untuk dokumen tahun 2023. Sementara realisasi nilai SAKIP pada tahun 2023 menggunakan nilai berdasarkan evaluasi SAKIP untuk dokumen tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai SAKIP pada tahun 2023 terealisasi sebesar 63,07 dengan capaian 84,09%. Sedangkan Pada tahun 2024, nilai SAKIP Perangkat Daerah naik menjadi 85,29 dengan capaian 110,77%. Terdapat kenaikan nilai yang cukup signifikan dari 3 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja naik 9,08 poin; Pengukuran Kinerja naik 7,46; dan Pelaporan Kinerja naik 5,68, sehingga secara keseluruhan naik 22,22.

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target sampai dengan tahun 2024 ini, maka di bawah akan disajikan data perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.B.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra
Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Capaian thd Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai SAKIP	Angka	85,29*	80	106,61%

Realisasi nilai SAKIP Sekretariat Daerah pada tahun 2024 sebesar 85,29 apabila dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebesar 80 maka capaian terhadap target akhir Rencana Strategis adalah 106,61%.

Untuk melihat perbandingan nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah lain, maka dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel III.B.2.4
Perbandingan nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah lain

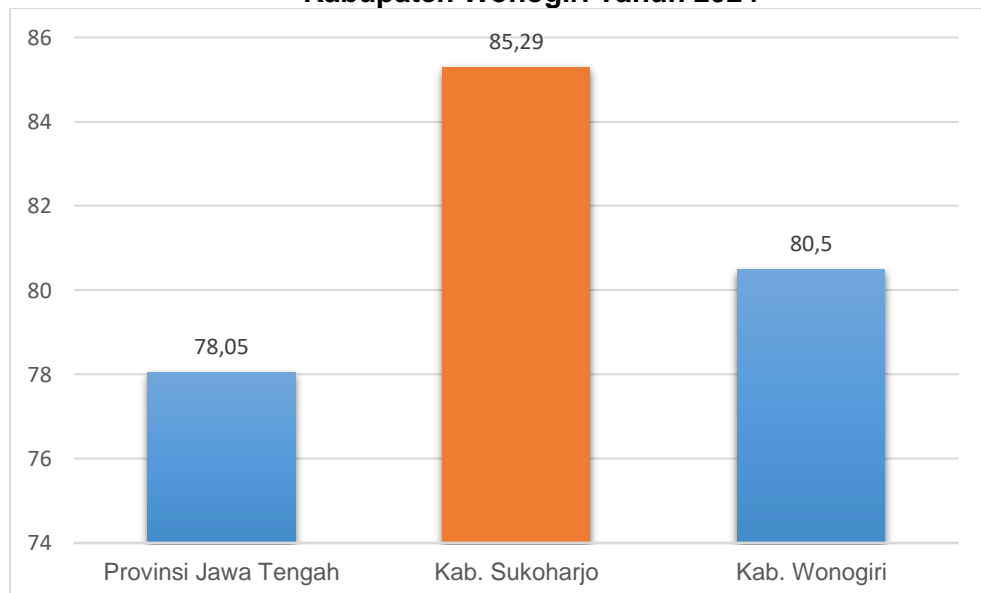
No	Nama SKPD	Nilai SAKIP	Predikat	Progress
1	Dinas Kesehatan	96,18	AA	17,45
2	Kecamatan Mojolaban	88,36	A	18,58
3	Sekretariat Daerah	85,29	A	22,22
4	BAPPERIDA	85,20	A	19,44
5	DPMPTSP	80,47	A	17,32
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,53	BB	10,43
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79,00	BB	6,34
8	Inspektorat Daerah	78,74	BB	13,66
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	78,28	BB	10,44
10	BKPSDM	77,99	BB	12,85
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	77,24	BB	12,06
12	Dinas Lingkungan Hidup	76,51	BB	10,37
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	76,44	BB	14,46
14	BPKPAD	76,03	BB	12,79
15	Dinas Perhubungan	75,86	BB	10,42
16	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	75,13	BB	8,22
17	Satuan Polisi Pamong Praja	74,82	BB	11,14
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74,71	BB	12,4
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	74,56	BB	11,48
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	74,56	BB	7,89
21	Kecamatan Baki	74,53	BB	11,59
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74,51	BB	4,44
23	Kecamatan Grogol	73,96	BB	12,16
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	73,22	BB	13,13
25	Dinas Sosial	72,92	BB	11,77
26	Dinas PPKB dan P3A	72,72	BB	8,14
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	72,68	BB	5,77
28	Kecamatan Bulu	72,64	BB	6,8
29	Dinas Komunikasi dan Informatika	72,64	BB	12,4
30	Kecamatan Tawang Sari	72,63	BB	12,09
31	Kecamatan Kartasura	71,11	BB	10,3
32	Kecamatan Bendosari	70,94	BB	11,21
33	Kecamatan Sukoharjo	69,80	B	6,23
34	Kecamatan Polokarto	68,82	B	5,4
35	Kecamatan Weru	68,52	B	8,23
36	Dinas Pangan	67,62	B	-4,54

No	Nama SKPD	Nilai SAKIP	Predikat	Progress
37	Kecamatan Nguter	66,61	B	3,35
38	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	62,03	B	25,25
39	Kecamatan Gatak	61,83	B	3,66
	RATA-RATA NILAI SAKIP OPD	74,99	BB	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai SAKIP Sekretariat Daerah sebesar 85,29 (A) berada pada peringkat 3 dari total 39 Perangkat Daerah. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan kenaikan nilai sebesar 22,22 poin, menjadikan Sekretariat Daerah sebagai OPD dengan progress kenaikan nilai tertinggi kedua se-Kabupaten Sukoharjo. Apabila dibandingkan dengan rata-rata nilai SAKIP OPD sebesar 74,99, maka nilai SAKIP Sekretariat Daerah masih lebih tinggi.

Untuk dapat melihat sejauh mana realisasi nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan nilai SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar III.B.1
Perbandingan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonogiri Tahun 2024



Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 85,29*.

Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 78,05 dan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiridengan nilai sebesar 80,50.

C. Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi

Rekapitulasi capaian IKU, anggaran dan realisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.C.1
Capaian IKU, Anggaran dan Realisasi

No.	IKU	Capaian IKU (%)	Anggaran	Realisasi	%
1.1	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	25.660.282.780	24.651.409.723	96,07%
1.2	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	124,07%	2.763.352.000	2.689.080.469	97,31%
1.3	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	100%	50.504.607.323	48.208.251.172	95,45%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	110,77%	50.000.000	49.599.200	99,19%

D. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Adapun data peta jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III.D.1
Jumlah Bezzeting dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

No	NAMA BAGIAN	BEZZETING	KEBUTUHAN	SELISIH
1	Umum	32	62	-30
2	Perekonomian dan SDA	10	18	-8
3	Administrasi Pembangunan	8	27	-19
4	Prokopim	15	38	-23
5	Kesejahteraan Rakyat	11	18	-7
6	Hukum	11	34	-23
7	Pemerintahan	9	16	-7
8	PBJ	17	49	-32
9	Organisasi	13	22	-9
Jumlah		126	284	-158

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebanyak 126 orang. Jika dibandingkan dengan kebutuhan sebanyak 284 orang, terdapat selisih sebanyak 158 orang. Meskipun terdapat selisih sumber daya manusia yang banyak, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo mampu memperoleh rata-rata capaian kinerja dari sasaran 1 dan sasaran 2 sebesar **107,77%** (kategori Sangat Baik).

2. Teknologi

a. e-koreksi

Aplikasi E-Koreksi merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terkait pengajuan koreksi Produk Hukum Daerah secara digital dan *paperless*. Aplikasi layanan *online* ini dikembangkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada Bagian Hukum serta mempercepat dan mempermudah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo khususnya dalam penyusunan Produk Hukum Daerah, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah, Instruksi Bupati, maupun Perjanjian Kerja Sama dan Kesepakatan Bersama.

Dalam Aplikasi E-Koreksi terdapat menu pengajuan draft/rancangan Produk Hukum Daerah yang akan dikoreksi dengan menyertakan Surat Pengantar yang seluruhnya di upload secara *online* sehingga tidak lagi memerlukan berkas fisik yang harus dikirim ke Bagian Hukum. Selain itu, di dalam Aplikasi E-Koreksi terdapat *timeline*/Riwayat Pengajuan berupa kolom status dan waktu yang dapat digunakan untuk mengontrol sejauh mana produk hukum yang dikirim oleh Perangkat Daerah telah diproses. Aplikasi E-Koreksi diharapkan mampu menjawab tuntutan efektivitas dalam melaksanakan koreksi Produk Hukum Daerah dan juga mampu memberikan kontribusi positif dalam keberlanjutan roda pemerintahan di era digitalisasi terhadap sistem pelayanan. Melalui Aplikasi E-Koreksi ini, pelayanan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terhadap koreksi Produk Hukum Daerah semakin cepat, mudah, akuntabilitas, transparan, dan mengikuti perkembangan zaman.

b. SIMPOK

Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan (SIMPOK) adalah sebuah aplikasi yang di-inisiasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagai alat bantu didalam pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo sehingga mempermudah dalam monitoring dan evaluasi terhadap proses penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

c. SI EMON BANGUN

SI EMON BANGUN merupakan Sistem Informasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan dalam Rangka Pengendalian dan Transparansi Pembangunan Infrastruktur, yaitu sebuah sistem yang diharapkan akan menjadi alat yang efektif dalam memantau, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo yang tidak lepas dari transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

SI EMON BANGUN adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan di Kabupaten Sukoharjo secara digitalisasi dalam rangka pengendalian dan transparansi pembangunan infrastruktur yang bisa diakses oleh masyarakat secara terbuka. Dalam hal ini Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo memfasilitasi kolaborasi antara Perangkat Daerah, Pelaksana Kegiatan, Konsultan Pengawas, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang bertujuan mendorong terciptanya mekanisme pembangunan infrastruktur yang berkualitas, disiplin, tertib administrasi, efektif serta efisien.

Masyarakat Sukoharjo dengan mudah memperoleh informasi yang akurat dan terkini tentang perkembangan pembangunan infrastruktur pada khususnya di daerah masing-masing melalui portal SI EMON BANGUN dengan alamat <https://siemon.pembangunan.sukoharjokab.go.id/> dan pada umumnya

bersama-sama melakukan pengawasan perkembangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukoharjo.

d. LPSE

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui aplikasi www.lpse.sukoharjokab.go.id. LPSE merupakan layanan pengelolaan teknologi informasi yang berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (Tender/Seleksi/Tender Cepat, Non Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, Pencatatan Pengadaan Darurat, e-Audit, dan Manajemen Kontrak). Selain itu LPSE juga memfasilitasi pendaftaran Pelaku Usaha baru di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Dengan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik data-data dapat tersimpan dalam sistem dan dapat diunduh apabila dibutuhkan

e. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

LPPD merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah input data LPPD dari perangkat daerah agar segera dapat disusun menjadi LPPD, aplikasi ini mempersingkat waktu dalam penyusunan LPPD yang dilaporkan kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

f. SIPATAS (Sistem Informasi Pilar Batas)

Sipatas dikembangkan bersama Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) dan masuk dalam layer Pusat Informasi Spasial Daerah (Pisda), sipatas memberikan informasi Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dan letak pilar batas yang menjadi penanda batas daerah dengan kabupaten/kota sekitar.

d. SINERGI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi bahwa semua gedung pemerintah harus menerapkan Manajemen Energi. Salah satu upaya penerapan manajemen energi adalah melaksanakan pelaporan penghematan energi setiap bulan. Sebagai upaya untuk memudahkan pelaporan penghematan energi dan air maka Sekretariat Daerah melalui Bagian Perekonomian dan SDA membuat aplikasi dengan nama SINERGI. Aplikasi tersebut memfasilitasi pelaporan penghematan energi dan air untuk semua perangkat daerah yang memiliki gedung. Aplikasi SINERGI menyampaikan pelaporan konsumsi Listrik dan air setiap bulan sehingga setiap tahunnya dapat diketahui Konsumsi Energi, Intensitas Kinerja Energi (IKE) dan upaya penghematan. Alamat Website: <https://sinergi.sukoharjokab.go.id>.

3. Tingkat Efisiensi

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024 mencapai Rp. 75.598.340.564,- atau 95,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 78.978.243.063,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.379.902.499,- atau 4,28%. Perhitungan tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Capaian kinerja} \times \text{pagu anggaran}) - \text{realisasi anggaran}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Adapun tingkat efisiensi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III.D.2
Tingkat Efisiensi**

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Interpretasi	Lokasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian			
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	100	100	100%	Rp23,467,419,980.00	Rp22,478,573,780.00	95.79%	4%	Efisien	Sekretariat Daerah
	Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	97	100	103,09%	Rp1.123.862.800,00	Rp1.112.794.194,00	99,02	0,98%	Efisien	
	Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	100	100	100%	Rp1,069,000,000.00	Rp1,060,041,749.00	99.16%	1%	Efisien	
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kajian/ Kebijakan yang disusun/ dievaluasi	5	5	100%	Rp967,000,000.00	Rp959,819,749.00	99.26%	0.75%	Efisien	Bagian Pemerintahan
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3	3	100%	Rp252,000,000.00	Rp248,973,500.00	98.80%	1.22%	Efisien	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	3	100%	Rp176,000,000.00	Rp175,238,000.00	99.57%	0.43%	Efisien	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah	4	4	100%	Rp539,000,000.00	Rp535,608,249.00	99.37%	0.63%	Efisien	
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang di Tanda Tangani	10	10	100%	Rp102,000,000.00	Rp100,222,000.00	98.26%	1.77%	Efisien	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10	10	100%	Rp102,000,000.00	Rp100,222,000.00	98.26%	1.77%	Efisien	
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	100	100	100%	Rp23,467,419,980.00	Rp22,478,573,780.00	95.79%	4.40%	Efisien	Bagian Kesra
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12	12	100%	Rp5,458,796,380.00	Rp4,879,343,780.00	89.38%	11.88%	Efisien	
Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3	3	100%	Rp16,094,850,000.00	Rp15,900,989,000.00	98.80%	1.22%	Efisien	
Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5	5	100%	Rp1,913,773,600.00	Rp1,698,241,000.00	88.74%	12.69%	Efisien	
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	97	100	103,09%	Rp1,123,862,800.00	Rp1,112,794,194.00	99.02%	5.20%	Efisien	Bagian Hukum
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Yang Tersusun	3	3	100%	Rp234,663,900.00	Rp232,148,809.00	98.93%	1.08%	Efisien	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	2	100%	Rp248,675,000.00	Rp247,727,500.00	99.62%	0.38%	Efisien	

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Interpretasi	Lokasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian			
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasikan	2	2	100%	Rp640,523,900.00	Rp632,917,885.00	98.81%	1.20%	Efisien	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan	100	100	100%	Rp681,616,000.00	Rp675,012,715.00	99.03%	0.98%	Efisien	Sekretariat Daerah
	Cakupan pengadaan barang dan jasa	45	77,49	172,20%	Rp973,636,000.00	Rp970,677,314.00	99.70%	60.15%	Efisien	
	Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	100	100	100%	Rp1,108,100,000.00	Rp1,043,390,440.00	94.16%	6.20%	Efisien	
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	9	9	100%	Rp783,100,000.00	Rp738,511,940.00	94.31%	6.04%	Efisien	Bagian Perekonomian dan SDA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3	3	100%	Rp153,100,000.00	Rp137,863,150.00	90.05%	11.05%	Efisien	
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	4	100%	Rp495,000,000.00	Rp475,407,840.00	96.04%	4.12%	Efisien	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	2	100%	Rp135,000,000.00	Rp125,240,950.00	92.77%	7.79%	Efisien	
Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam	7	7	100%	Rp325,000,000.00	Rp304,878,500.00	93.81%	6.60%	Efisien	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3	3	100%	Rp250,000,000.00	Rp238,021,500.00	95.21%	5.03%	Efisien	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2	2	100%	Rp25,000,000.00	Rp21,594,500.00	86.38%	15.77%	Efisien	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,	2	2	100%	Rp50,000,000.00	Rp45,262,500.00	90.53%	10.47%	Efisien	
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100	100	100%	Rp681,616,000.00	Rp675,012,715.00	99.03%	0.98%	Efisien	Bag. Admpemb
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1	1	100%	Rp48,076,000.00	Rp47,683,300.00	99.18%	0.82%	Efisien	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	4	100%	Rp399,605,000.00	Rp394,482,915.00	98.72%	1.30%	Efisien	

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Interpretasi	Lokasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian			
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	12	100%	Rp233,935,000.00	Rp232,846,500.00	99.53%	0.47%	Efisien	
Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	108.26	108%	Rp973,636,000.00	Rp970,677,314.00	99.70%	8.59%	Efisien	Bagian PBJ
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1000	837	84%	Rp321,836,000.00	Rp320,678,166.00	99.64%	-16.00%	Tidak efisien	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	12	100%	Rp198,000,000.00	Rp197,446,548.00	99.72%	0.28%	Impas	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	370	522	141%	Rp453,800,000.00	Rp452,552,600.00	99.73%	41.47%	Efisien	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi	100	100	100%	Rp826,797,000.00	Rp803,970,797.00	97.22%	2.86%	Efisien	Sekretariat Daerah
Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	100	100	100%	Rp292,624,000.00	Rp282,865,943.00	96.67%	3.45%	Efisien	Bagian Organisasi
	Prosentase Kegiatan Movev dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100	100	100%	Rp140,318,000.00	Rp135,841,389.00	96.81%	3.30%	Efisien	
	Prosentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang ditetapkan	100	100	100%	Rp113,890,000.00	Rp110,837,000.00	97.32%	2.75%	Efisien	
	Prosentase Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Kelembagaan dan Anjab yang dilaksanakan	100	100	100%	Rp279,965,000.00	Rp274,260,980.00	97.96%	2.08%	Efisien	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	2	2	100%	Rp117,086,000.00	Rp111,002,485.00	94.80%	5.48%	Efisien	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	2	100%	Rp175,538,000.00	Rp171,863,458.00	97.91%	2.14%	Efisien	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana	2	2	100%	Rp140,318,000.00	Rp135,841,389.00	96.81%	3.30%	Efisien	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	1	1	100%	Rp113,890,000.00	Rp110,837,000.00	97.32%	2.75%	Efisien	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	4	4	100%	Rp279,965,000.00	Rp274,260,980.00	97.96%	2.08%	Efisien	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Jumlah Jenis Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai	100	100	100%	Rp886,708,000.00	Rp883,140,000.00	99.60%	0.40%	Efisien	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100	100%	Rp886,708,000.00	Rp883,140,000.00	99.60%	0.40%	Efisien	
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Protokol, Kegiatan Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	12	100%	Rp3,844,121,640.00	Rp3,822,703,819.00	99.44%	0.56%	Efisien	

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Interpretasi	Lokasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian			
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	12	100%	Rp208,544,000.00	Rp201,399,083.00	96.57%	3.55%	Efisien	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	12	100%	Rp2,565,698,640.00	Rp2,552,973,135.00	99.50%	0.50%	Efisien	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	12	100%	Rp1,069,879,000.00	Rp1,068,331,601.00	99.86%	0.14%	Efisien	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	100	100	100%	Rp17,211,582,083.00	Rp16,376,654,152.00	95.15%	5.10%	Efisien	Sekretariat Daerah
	Cakupan Peningkatan Sarana/ Pra sarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	100	100	100%	Rp27,785,398,000.00	Rp26,371,547,089.00	94.91%	5.36%	Efisien	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	100%	Rp. 50.000.000,00	Rp.49.599.200,00	99,20	0,81%	Efisien	Bagian Umum
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2	2	100%	Rp30,000,000.00	Rp29,599,200.00	98.66%	1.35%	Efisien	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	1	100%	Rp5,000,000.00	Rp5,000,000.00	100.00%	0.00%	Impas	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	1	100%	Rp5,000,000.00	Rp5,000,000.00	100.00%	0.00%	Impas	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	1	100%	Rp5,000,000.00	Rp5,000,000.00	100.00%	0.00%	Impas	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	1	100%	Rp5,000,000.00	Rp5,000,000.00	100.00%	0.00%	Impas	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	152	148	97%	Rp17,161,582,083.00	Rp16,327,054,952.00	95.14%	2.35%	Tidak Efisien	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	125	121	97%	Rp16,398,021,083.00	Rp15,586,717,352.00	95.05%	1.84%	Tidak Efisien	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%	Rp737,122,000.00	Rp716,979,700.00	97.27%	2.81%	Efisien	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%	Rp5,272,000.00	Rp5,272,000.00	100.00%	0.00%	Impas	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	2	100%	Rp16,167,000.00	Rp13,151,900.00	81.35%	22.93%	Efisien	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	12	100%	Rp5,000,000.00	Rp4,934,000.00	98.68%	1.34%	Efisien	

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Interpretasi	Lokasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian			
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	210	210	100%	Rp553,442,000.00	Rp527,643,000.00	95.34%	4.89%	Efisien	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	8	8	100%	Rp274,012,000.00	Rp266,403,000.00	97.22%	2.86%	Efisien	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200	200	100%	Rp269,430,000.00	Rp251,240,000.00	93.25%	7.24%	Efisien	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	100%	Rp5,000,000.00	Rp5,000,000.00	100.00%	0.00%	Impas	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	100%	Rp5,000,000.00	Rp5,000,000.00	100.00%	0.00%	Impas	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	759	759	100%	Rp4,541,149,000.00	Rp4,289,048,540.00	94.45%	5.88%	Efisien	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	100%	Rp160,064,000.00	Rp157,515,258.00	98.41%	1.62%	Efisien	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100%	Rp425,250,000.00	Rp372,193,250.00	87.52%	14.26%	Efisien	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	100%	Rp325,000,000.00	Rp316,526,222.00	97.39%	2.68%	Efisien	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	8	100%	Rp1,679,960,000.00	Rp1,545,329,995.00	91.99%	8.71%	Efisien	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100%	Rp150,375,000.00	Rp147,364,000.00	98.00%	2.04%	Efisien	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	100%	Rp110,500,000.00	Rp107,035,000.00	96.86%	3.24%	Efisien	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	30	100%	Rp420,000,000.00	Rp419,879,371.00	99.97%	0.03%	Efisien	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	700	700	100%	Rp1,270,000,000.00	Rp1,223,205,444.00	96.32%	3.83%	Efisien	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	182	182	100%	Rp7,547,085,000.00	Rp7,407,155,262.00	98.15%	1.89%	Efisien	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	173	173	100%	Rp6,484,250,000.00	Rp6,382,475,000.00	98.43%	1.59%	Efisien	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	9	100%	Rp1,062,835,000.00	Rp1,024,680,262.00	96.41%	3.72%	Efisien	

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Interpretasi	Lokasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48	48	100%	Rp6,926,595,000.00	Rp6,560,875,412.00	94.72%	5.57%	Efisien	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%	Rp186,000,000.00	Rp165,232,900.00	88.83%	12.57%	Efisien	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	Rp2,620,000,000.00	Rp2,519,614,109.00	96.17%	3.98%	Efisien	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100%	Rp308,995,000.00	Rp255,132,535.00	82.57%	21.11%	Efisien	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100%	Rp3,811,600,000.00	Rp3,620,895,868.00	95.00%	5.27%	Efisien	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2431	2431	100%	Rp4,374,668,000.00	Rp4,151,834,129.00	94.91%	5.37%	Efisien	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	2	100%	Rp175,575,000.00	Rp153,158,884.00	87.23%	14.64%	Efisien	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79	79	100%	Rp1,651,405,000.00	Rp1,628,270,641.00	98.60%	1.42%	Efisien	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2345	2345	100%	Rp635,188,000.00	Rp564,378,866.00	88.85%	12.55%	Efisien	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100%	Rp971,300,000.00	Rp909,865,761.00	93.68%	6.75%	Efisien	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	100%	Rp941,200,000.00	Rp896,159,977.00	95.21%	5.03%	Efisien	

Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Interpretasi	Lokasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian			
Kegiatan Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	24	24	100%	Rp2,727,248,000.00	Rp2,400,393,646.00	88.02%	13.62%	Efisien	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8	8	100%	Rp2,060,923,000.00	Rp1,811,141,929.00	87.88%	13.79%	Efisien	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8	8	100%	Rp560,000,000.00	Rp486,822,777.00	86.93%	15.03%	Efisien	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	8	8	100%	Rp106,325,000.00	Rp102,428,940.00	96.34%	3.80%	Efisien	
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelayanan kinerja administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	4	4	100%	Rp1,115,211,000.00	Rp1,034,597,100.00	92.77%	7.79%	Efisien	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	100%	Rp819,811,000.00	Rp740,525,580.00	90.33%	10.71%	Efisien	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	100%	Rp295,400,000.00	Rp294,071,520.00	99.55%	0.45%	Efisien	

E. Capaian Indikator Kinerja

Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.E.1
Capaian Indikator Kinerja

Nomor	kode rekening	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023	Lokasi
					Target	Realisasi	Realisasi	
1 Tujuan		Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	83	86,04	85,01	Sekretariat Daerah
			Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	angka	85	99,36	97,41	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	70	66,94	65,04	
1:01 Sasaran		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	101,01	100	Sekretariat Daerah
			Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan	%	100	113,26	100	
			Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	%	100	100	100	
1:01:01	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	%	100	100	95	Sekretariat Daerah
			Cakupan Penyusunan produk dan pelayanan hukum	%	97	100	100	
			Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah	%	100	100	100	
	4.01.02.201	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kajian/ Kebijakan yang disusun/ dievaluasi	Kebijakan	5	5	5	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.201.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	3	3	3	
	4.01.02.201.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	3	3	
	4.01.02.201.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah	Dokumen	4	4	4	
	4.01.02.204	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang di Tanda Tangani	Dokumen	10	10	10	
	4.01.02.204.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	10	10	10	
	4.01.02.202	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	%	100	100	95	Bagian Kesra
	4.01.02.202.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	dokumen	12	12	11	
	4.01.02.202.02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	3	3	4	
	4.01.02.202.03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	5	5	5	
	4.01.02.203	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Fasilitasi dan koordinasi Hukum	%	97	100	100	Bagian Hukum
	4.01.02.203.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Yang Tersusun	Dokumen	3	3	3	
	4.01.02.203.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	2	2	8	
4.01.02.203.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasikan	Dokumen	2	2	2		
1.1.2	04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan pembangunan	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Cakupan pengadaan barang dan jasa	nilai	45	77,49	71,85	
			Cakupan Perumusan kebijakan, pengkoordinasian, sosialisasi, fasilitasi dan monev pelaksanaan kebijakan perekonomian dan SDA	%	100	100	100	

Nomor	kode rekening	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023	Lokasi
					Target	Realisasi	Realisasi	
	4.01.03.201	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	%	100	100	100	Bagian Perekonomian dan SDA
	4.01.03.201.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	dok	3	3	3	
	4.01.03.201.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Lap	4	4	4	
	4.01.03.201.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dok	2	2	3	
	4.01.03.204	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam	%	100	100	100	
	4.01.03.204.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dok	3	3	3	
	4.01.03.204.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	2	2	2	
	4.01.03.204.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,	Dokumen	2	2	2	
	4.01.03.202	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	%	100	100	100	Bagian Administrasi Pembangunan
	4.01.03.202.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	dokumen	1	1	1	
	4.01.03.202.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	laporan	4	4	4	
	4.01.03.202.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	12	12	12	
	4.01.03.203	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	108.26	118,67	Bagian PBJ
	4.01.03.203.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1000	837	988	
	4.01.03.203.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	12	12	12	
	4.01.03.203.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	370	522	582	
1:01:03	04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan efektifitas dan efisiensi penataan organisasi	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
	4.01.03.01.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	%	100	100	100	Bagian Organisasi
			Prosentase Kegiatan Monev dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan	%	100	100	100	
			Prosentase Kebijakan Bidang Ketatalaksanaan yang ditetapkan	%	100	100	100	
			Prosentase Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Kelembagaan dan Anjab yang dilaksanakan	%	100	100	100	
	4.01.03.01.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	dokumen	2	2	2	
	4.01.03.01.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	dokumen	2	2	2	
	4.01.03.01.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana	dokumen	2	2	2	
	4.01.03.01.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	laporan	1	1	1	
	4.01.03.01.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	dokumen	4	4	4	

Nomor	kode rekening	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023	Lokasi
					Target	Realisasi	Realisasi	
	01.205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Jumlah Jenis Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Cukai	%	100	100	100	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	01.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	100	3000	
	01.214	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Protokoler, Kegiatan Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	%	100	100	100	
	01.214.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	12	12	
	01.214.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	12	12	
	01.214.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	12	12	
01.02 Sasaran		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	nilai	77	85,29	63,07	Sekretariat Daerah
1:02:01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pencapaian kinerja dan pelayanan perangkat daerah	%	100	100	100	Sekretariat Daerah
			Cakupan Peningkatan Sarana/ Pra sarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	%	100	100	100	
	4.01.01.201	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	Bagian Umum
	4.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dok	2	2	1	
	4.01.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	dok	1	1	1	
	4.01.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	dok	1	1	1	
	4.01.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	dok	1	1	1	
	4.01.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	dok	1	1	1	
	4.01.01.202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	148	96,73	
	4.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	125	121	105	
	4.01.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	12	12	12	
	4.01.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	1	
	4.01.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	dok	2	2	2	
	4.01.01.202.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dok	12	12	12	
	4.01.01.205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	97,14	
	4.01.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	paket	8	8	9	
	4.01.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	200	200	155	
	4.01.01.205.04	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dok	1	1	1	
	4.01.01.205.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	1	1	1	
	4.01.01.206.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	
	4.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3	3	4	
	4.01.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	2	2	

Nomor	kode rekening	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023	Lokasi
					Target	Realisasi	Realisasi	
	4.01.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	3	4	
	4.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	8	8	7	
	4.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	1	
	4.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok	12	12	12	
	4.01.01.206.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	30	30	32	
	4.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	700	700	650	
	4.01.01.207	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	
	4.01.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	173	173	1	
	4.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	9	9	3	
	4.01.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	0	1	
	4.01.01.208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	
	4.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	
	4.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	
	4.01.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	
	4.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantoR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	
	4.01.01.209	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	
	4.01.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	2	2	2	
	4.01.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	79	79	79	
	4.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	2345	2345	2330	
	4.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	3	
	4.01.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	5	
	4.01.01.212.	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	%	100	100	100	
	4.01.01.212.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	8	8	6	

Nomor	kode rekening	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023	Lokasi
					Target	Realisasi	Realisasi	
	4.01.01.212.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	8	8	5	
	4.01.01.212.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	8	8	4	
	4.01.01.211	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelayanan kinerja administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	%	100	100	100	
	4.01.01.211.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	2	
	4.01.01.211.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	2	

F. Penghargaan

Selama tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih, diantaranya:

1. JDIH Award 2024

Penganugerahan ini merupakan penghargaan yang diberikan bagi anggota pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum yang mampu melakukan terobosan dan inovasi dalam membangun kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang mendasar pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

JDIH Kabupaten Sukoharjo yang dikelola oleh Bagian Hukum memperoleh peringkat II Nasional Penghargaan Pengelolaan JDIH Nasional Tahun 2024

Gambar III.F.1

Penghargaan Pengelolaan JDIH Nasional Tahun 2024



2. Pengelolaan JDIH tingkat Provinsi

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 002.5/41 Tahun 2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, dalam hal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pemberian penghargaan JDIH terbaik, bertempat di Gedung Gradhika Bakti Praja Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024. JDIH Kabupaten Sukoharjo yang dikelola oleh Bagian Hukum memperoleh penghargaan terbaik kesatu pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Gambar III.F.2
Pengelolaan JDIH Tingkat Provinsi Jawa Tengah



3. Penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Senin, 16 Desember 2024. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerima **Penghargaan Terbaik III Indeks Reformasi Hukum Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2024**. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas capaian Kabupaten Sukoharjo sebagai peringkat 3 dalam kategori pemerintah kabupaten.

Gambar III.F.3
Penghargaan Indeks Reformasi Hukum



4. Penghargaan Subroto Tahun 2024

Penghargaan Subroto Award merupakan kegiatan untuk memberikan penghargaan kepada para institusi pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor bangunan dan industri sehubungan dengan upaya-upaya efisiensi dan konsevasi energi terbaik yang telah diterapkan di lingkungannya. Pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mengikuti Ajang Penghargaan Subroto Award bidang Efisiensi Energi Kategori Penghematan Energi pada instansi pemerintah Sub Kategori Pemerintah Daerah dengan mengajukan Bangunan Gedung Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo sebagai bangunan gedung yang melakukan uapaya penghematan energi dan berhasil memperoleh penghargaan Subroto Award Tahun 2024 Bidang Efisiensi atau Efisiensi Energi Kategori Penghematan Energi pada Instansi Pemerintah Sub Kategori Pemerintah Daerah . Penghargaan Subroto Award diserahkan oleh Menteri Energi dan SDM Mineral RI pada tanggal 10 Oktober 2024 dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Gambar III.F.4
Penghargaan Subroto dari Kementerian ESDM



5. Penghargaan EBTKE Tahun 2024 Bidang Efisiensi

Sebagai bentuk apresiasi atas Kinerja dan dukungan dalam upaya percepatan dan pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi memberikan Penghargaan kepada Stakeholder EBTKE Tahun 2024. Gedung Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo yang diajukan dalam Penghargaan Subroto Award 2024 juga telah mendapatkan Juara 1 Penghargaan EBTE bidang Efisiensi Energi Kategori Penghematan Energi pada instansi pemerintah Sub Kategori Pemerintah Daerah.

Gambar III.F.5
**Penghargaan EBTKE dari Direktorat Jenderal Energi Baru,
Terbarukan dan Konservasi Energi**



6. Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berhasil memperoleh Peringkat 2 Nasional Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan perolehan nilai sebesar 99,36 Zona Hijau Opini Kualitas Tertinggi (A). Perolehan nilai tersebut naik secara signifikan dari tahun ketahun, dimana pada Tahun 2022

Kabupaten Sukoharjo memperoleh nilai 90.19, Tahun 2023 memperoleh nilai 97.42.

Capaian ini adalah buah dari komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan yaitu Bupati Sukoharjo, seluruh Perangkat Daerah yang dijadikan lokus penilaian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PM dan PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puskesmas Kartasura, Puskesmas Sukoharjo dan Bagian Organisasi Setda Kab. Sukoharjo untuk menyelenggarakan dan menghadirkan pelayanan publik yang prima dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar III.F.6
Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
oleh Ombudsman RI



7. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil PEKPPP pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memperoleh Indeks 4,60 (A) dan berada pada peringkat ke-9 (Sembilan) Nasional nilai PEKPPP Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gambar III.F.7
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Tahun 2024



C. KABUPATEN

No	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
1.	Kabupaten Cilacap	4,64	4,64	4,68	4,65	A
2.	Kabupaten Sidoarjo	4,54	4,75	4,66	4,65	A
3.	Kabupaten Sleman	4,59	4,66	4,63	4,63	A
4.	Kabupaten Jember	4,59	4,75	4,51	4,62	A
5.	Kabupaten Banyumas	4,51	4,71	4,61	4,61	A
6.	Kabupaten Kudus	4,56	4,64	4,63	4,61	A
7.	Kabupaten Sampang	4,33	4,69	4,79	4,60	A
8.	Kabupaten Madiun	4,52	4,75	4,53	4,60	A
9.	Kabupaten Jombang	4,60	4,67	4,52	4,60	A
10.	Kabupaten Sukoharjo	4,43	4,78	4,58	4,60	A
11.	Kabupaten Banyuwangi	4,52	4,72	4,54	4,59	A
12.	Kabupaten Kebumen	4,56	4,68	4,54	4,59	A
13.	Kabupaten Sumedang	4,56	4,57	4,62	4,58	A
14.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4,52	4,70	4,52	4,58	A
15.	Kabupaten Purwakarta	4,65	4,47	4,62	4,58	A
16.	Kabupaten Wonogiri	4,44	4,61	4,68	4,58	A

8. Capaian Tingkat Kematangan UKPBJ

Piagam Penghargaan yang diberikan oleh LKPP RI kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo atas pencapaiannya memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif).

Gambar III.F.8
Capaian Tingkat Kematangan UKPBJ



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan staf ahli serta pelayanan administratif.

Berdasarkan uraian dan beberapa data dari bab ke bab yang tersaji di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan dapat diukur dengan hasil kategori Sangat Baik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1 dapat tercapai **104,76%** dengan kategori **Sangat Baik** dan Sasaran 2 dapat tercapai **110,77%** kategori **Sangat Baik**.

B. Progress Penyelesaian Isu Strategis

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo memiliki beberapa isu strategis yaitu:

1. Belum optimalnya penyusunan laporan kinerja
Isu strategis ini masih dalam upaya optimalisasi dengan melakukan koordinasi antar bagian untuk pengumpulan dan pengukuran datanya serta mengadakan rapat koordinasi membahas draft LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebelum dilakukan reviu LKjIP oleh Inspektorat Daerah.
2. Belum optimalnya pelaporan pelaksanaan APBD
Bagian Administrasi Pembangunan terus berupaya untuk mengoptimalkan pelaporan pelaksanaan APBD. Alternatif solusinya yaitu melakukan rapat koordinasi dan pengendalian secara berkala dengan OPD terkait untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan; mencari solusi apabila ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan; dan memberikan batas waktu maksimal penginputan ke sistem (sistem akan dikunci secara otomatis setelah mencapai batas waktu maksimal penginputan) serta mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Kegiatan (SIMPOK) dengan aplikasi SIPD.
3. Belum optimalnya katalog versi 6

Dalam rangka peralihan dari Katalog Versi 5 menjadi Katalog Versi 6, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu: sosialisasi dan pendampingan pembuatan akun Katalog Versi 6 bagi Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Bendahara; berkoordinasi dengan LKPP untuk implementasi Katalog Versi 6; dan mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait dengan Katalog Versi 6.

4. Penegasan batas daerah

Dalam Kegiatan Penegasan Batas Daerah, Bagian Pemerintahan melaksanakan dengan koordinasi pengampu kepentingan terkait seperti Bapperida, DPUPR, Kantor Pertanahan/BPN Sukoharjo, BPKPAD, DPMD dll. Rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala dan terhadap isu/kendala yang muncul secara insidental diselesaikan dengan bantuan teknologi informasi dan/atau tinjauan ke lapangan. Selain itu juga peningkatan kompetensi ASN yang menangani Penegasan Batas Daerah melalui pendidikan/Bimbingan Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

5. Belum optimalnya pelayanan Kedinasan KDH / WKDH

Isu strategis ini masih dalam upaya optimalisasi dikarenakan jadwal acara Pimpinan Daerah yang sering mendadak dan berubah – ubah. Pelayanan kedinasan tersebut juga belum optimal dikarenakan kekurangan sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas yang mendukung output kegiatan Kepala Daerah, baik pelayanan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan. Selanjutnya juga perlu koordinasi dan sinergi yang lebih intens dengan perangkat daerah yang menjadi penyelenggara acara sehingga pelayanan kepada Kepala Daerah dapat lebih optimal.

6. Sarana/prasarana kerja kurang memadai

Isu strategis ini masih dalam upaya optimalisasi dikarenakan anggaran terkait sarana/prasarana kerja yang terbatas sehingga beberapa bangunan yang sudah direncanakan untuk diperbaiki, perbaikannya tidak dapat dilaksanakan.

7. Belum Optimalnya Kinerja BUMD

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah berupaya melaksanakan pembinaan BUMD dalam rangka meningkatkan kinerja, meningkatkan PAD dan meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, langkah yang telah dilakukan adalah mengadakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD per Triwulan, Semester dan tahunan.

8. **Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Kehidupan Keagamaan**
Bagian Kesejahteraan Rakyat terus berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan di Kabupaten Sukoharjo. Upaya yang telah dilakukan antara lain dengan menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara rutin yang diikuti oleh masyarakat umum, melaksanakan pembinaan keagamaan bagi ASN dan karyawan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, memfasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji, serta memberikan Bantuan Hibah uang kepada Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, dan Organisasi/Kelompok Keagamaan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.
9. **Belum optimalnya proses penyusunan produk hukum dan publikasi hukum.**
Bagian Hukum terus mendorong dan berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam melakukan optimalisasi penyusunan produk hukum dan publikasi hukum. Hal ini menjadi isu penting, mengingat keberhasilan pembangunan hukum sangat bergantung pada efektifitas proses penyusunan,transparansi publikasi, adapun penyelesaian isu strategis adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis terkait penyusunan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat dan aparaturn pemerintah.

C. Saran

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di masa mendatang antara lain :

- Memaksimalkan pengumpulan dan pengukuran kinerja dengan menggunakan spreadsheet.
- Mengadakan rapat koordinasi pengukuran kinerja setiap triwulan.
- Perlu lebih intensif dalam mensinergikan kegiatan dengan Perangkat Daerah lain
- Memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sukoharjo, Januari 2025
 SEKRETARIS DAERAH

WIDODO, S.H, M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19650523 199203 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDODO, SH., MH

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS SANTOSA.

Jabatan : Plt. Bupati Sukoharjo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 31 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. BUPATI SUKOHARJO,



Pihak Pertama,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 2. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan. 3. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Administrasi Umum	100% 100% 100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	77

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 25.660.282.780,-	
	a. Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Anggaran : Rp. 1.123.862.800,-		APBD
	b. Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan Anggaran : Rp. 967.000.000,-		APBD
	c. Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah Anggaran : Rp. 102.000.000,-		APBD
	d. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Anggaran : Rp. 23.467.419.980		DAU
2.	Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.763.352.000,-	
	a. Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Anggaran : Rp. 783.100.000,-		DAU
	b. Kegiatan : Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan terkait Sumber Daya Alam Anggaran : Rp. 125.000.000,- Rp. 200.000.000,-		DAU DBHCHT

No.	Program	Anggaran	Keterangan
c.	Kegiatan : Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Anggaran : Rp. 681.616.000,-	DAU
d.	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	Anggaran : Rp. 973.636.000,-	APBD
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 50.554.608.283,-	
a.	Kegiatan : Penataan Organisasi	Anggaran : Rp. 826.797.000,-	APBD
b.	Kegiatan : Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggaran : Rp. 3.844.123.200,-	APBD
c.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Anggaran : Rp. 886.708.000,- Rp. 553.442.000,-	DBH APBD
d.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Anggaran : Rp. 50.000.000,-	APBD
e.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran : Rp. 17.161.582.083,-	APBD
f.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Anggaran : Rp. 4.511.149.000,-	APBD
g.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran : Rp. 7.547.085.000,-	APBD
h.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran : Rp. 6.951.595.000,-	APBD
i.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran : Rp. 4.339.668.000,-	APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
j.	Kegiatan : Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Anggaran : Rp. 1.115.211.000,-		APBD
k.	Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Anggaran : Rp. 2.767.248.000,-		APBD
JUMLAH		Rp. 78.978.243.063,-	

Sukoharjo, 31 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. BUPATI SUKOHARJO,

AGUS SANTOSA



Pihak Pertama,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

WIDODO, SH., MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19650523 199203 1 008

